



MUKOMUKO

SENIN, 04 MARET 2024

SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Dugaan Tipikor RSUD Mukomuko

Bulan Ini Penetapan Tsk Massal

MUKOMUKO - Penanganan kasus RSUD Mukomuko yang saat ini ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko.

Yang statusnya sudah tahap penyidikan, Kejari Mukomuko pastikan dalam minggu ini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan auditor oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu rampung.

Sehingga, jika tidak ada halangan di awal Maret ini akan dilakukan penetapan tersangka berjamaah.

"Kami tidak pernah berhenti rampungkan perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) RSUD Mukomuko. Maka dalam minggu ini, LHP akan kita terima, dalam dua tiga hari kita tela'ah. Sudah pasti kita lanjutkan dengan penetapan tersangka," kata Kepala Kejari (Kejari) Mukomuko Rudi Iskandar SH, MH melalui Kasi Pidsus, Agung Malik Hakim SH, MH.

Agung juga menyampaikan, berkaitan dengan dugaan tipikor pengelolaan keuangan RSUD Mukomuko tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, untuk estimasi kerugian negara (KN) sementara kurang lebih men-

capai Rp3 miliar, dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah karena kepastian angkat KN setelah LHP terbit.

Agung menyebutkan, yang pasti perjalanan pengungkapan perkara dugaan tipikor pengelolaan keuangan RSUD ini, jaksa harus bekerja ekstra.

Pasalnya berkas keuangan mencapai 36 ribu transaksi keuangan selama 6 tahun.

Selain itu dalam proses pemeriksaan saksi, beberapa saksi harus benar-benar ditunjukkan bukti dugaan baru mengakui adanya dugaan.

"Perkara ini cukup memakan waktu 36 ribu transaksi harus kita bedah satu persatu. Kemudian juga saksi-saksi ini memang sangat alot kita

dimintai keterangan, tidak mengetahui apa yang ditanyakan penyidik. Yang pastinya fokus pemeriksaan kita berkaitan temuan mark up (kelebihan bayar, red) dan SPJ fiktif," terangnya.

Sedangkan untuk jumlah saksi yang telah diperiksa berkaitan perkara ini. Sudah lebih dari 500 saksi.

Mulai dari Manajemen RSUD yang memiliki tanggungjawab atas penggunaan anggaran dari tahun 2016 sampai dengan Desember 2021.

Pimpinan pemasok obat dan alat kesehatan, selanjutnya seluruh tenaga kesehatan termasuk tenaga non medis RSUD Mukomuko.

Sedangkan yang terakhir dilakukan pemeriksaan 21 pemilik toko di Kabupaten Mukomuko, yang menjadi tempat berbelanja pihak manajemen RSUD Mukomuko.

"Kami yakin banyak warga Mukomuko yang bertanya, kapan perkara RSUD ini akan rampung. Semaksimal mungkin kami lakukan agar perkara ini dapat tuntas sehingga KN yang didapatkan bisa kembali ke negara," ucapnya.

Agung juga memastikan, belum ada dari para saksi-saksi yang telah diperiksa menitipkan uang terkait timbulnya KN yang masih estimasi tersebut.

Maka dari itu selesai telaah LHP. Puluhan saksi akan dipanggil kembali dan langsung akan ada penetapan tersangka diantara saksi-saksi yang diperiksa tersebut.

"Untuk perkiraan jumlah tersangka yang pasti berjamaah dan lebih dari dua orang. Untuk pastinya kita tunggu nanti ya. Selain itu kami juga berharap adanya perkara ini, tidak mengganggu pelayanan di RSUD Mukomuko," tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Mukomuko Ali Saftaini, SE sangat mendukung penuh kinerja Kejari Mukomuko dalam mengungkap kasus tipikor keuangan RSUD Mukomuko

Sebab jika dipenuhi nuansa korupsi tentu akan memberikan dampak negatif kepada pembangunan daerah.

"Kami DPRD Mukomuko sangat mendukung kinerja Kejari Mukomuko, dimana harapkan kami seluruh yang terlibat dari akar hingga ke atas bisa terjaring. Sebab jika tidak tentu akan membentuk koloni-koloni baru," harapnya.

Sebagaimana diketahui setelah dinaikannya status dugaan tipikor keuangan RSUD Mukomuko ke penyidikan, terus berproses.

Mulai dari melakukan penyitaan berkas dokumen-dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran manajemen RSUD Mukomuko dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Pemeriksaan saksi untuk dimintai keterangan berkaitan isi dari laporan, baik uang masuk, uang keluar, permintaan barang, dan kebutuhan lainnya.

Termasuk penyidik juga melakukan pemanggilan terhadap pihak BPJS, berkaitan dengan dana klaim BPJS, pihak perusahaan obat dan melakukan pencocokan data penerima gaji dan honor terhadap 500 pegawai RSUD baik medis dan non medis.

Alhasil dalam pemeriksaan-pemeriksaan tersebut penyidik Kejari Mukomuko banyak menemukan kejanggalan.

Baik itu mark up belanja, dan SPJ fiktif. Untuk manajemen RSUD yang telah diperiksa mulai dari seluruh pimpinan RSUD Mukomuko, Bendahara uang masuk dan Bendahara pengeluaran.

Pimpinan pemasok obat dan Alkes, Pimpinan BPJS Kesehatan Mukomuko, seluruh pegawai RSUD penerima gaji dan honor, termasuk pemilik ritel tempat belanja RSUD Mukomuko telah dilakukan pemanggilan oleh penyidik dengan status saksi. (pir)